

## Implementasi Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Dalam Mengurangi Pengangguran Di Wilayah Jakarta Utara

**Erina Latri Rahayu, Firman F**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

email: [erinalrahayu@gmail.com](mailto:erinalrahayu@gmail.com)



### INFO ARTIKEL

#### **Info Publikasi:**

*Research Article*

#### **Kata Kunci:**

*Implementasi Kebijakan;  
Tenaga Kerja Mandiri;  
Pengangguran;*

#### **Article History**

Dikirim: 13 Januari, 2023;

Diterima: 11 Februari, 2023;

Dipublikasi: 27 Februari 2023;

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Dalam Mengurangi Pengangguran Di Jakarta Utara. Pengangguran merupakan masalah sosial yang serius di Wilayah Jakarta Utara. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah meluncurkan program tenaga kerja mandiri yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memulai usaha sendiri. Implementasi program ini melibatkan sejumlah langkah strategis yang ditujukan untuk meningkatkan peluang kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskript kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Program Ini berfokus pada penelitian dan keterampilan. Peserta program diberikan pelatihan dalam berbagai bidang seperti bidang kue, tata rias, service ac dan menjait. Dengan keterampilan yang ditingkatkan, akan membantu peserta akan membantu mereka dalam mencari peluang kerja yang lebih baik. Program ini juga menciptakan jembatan antara usaha mandiri dengan perusahaan yang membutuhkan layanan atau produk tertentu. Dengan kolaborasi semacam ini, para peserta program memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Program ini dapat menyediakan bantuan keuangan berupa pinjaman dengan suku bunga rendah atau hibah modal usaha bagi peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dan memiliki rencana bisnis. Bantuan keuangan ini membantu mereka memulai bisnis tanpa hambatan besar. Kemudian program ini menyediakan bantuan fasilitas untuk memulai usaha mandiri. Program ini juga melibatkan pembinaan dan pendampingan usaha. Peserta program didampingi pendamping dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, yang membantu mereka menghadapi tantangan dan memberikan saran untuk mengembangkan bisnis mereka secara berkelanjutan. Program ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

---

**ABSTRAC**

*This research aims to analyze the Implementation of the Self-Employment Program (Program Tenaga Kerja Mandiri or TKM) in Reducing Unemployment in North Jakarta. Unemployment is a serious social issue in the North Jakarta region. To address this problem, the government has launched the self-employment program with the goal of empowering the community with the skills and knowledge needed to start their own businesses. The implementation of this program involves several strategic steps aimed at improving job opportunities and reducing unemployment rates. The research method used is qualitative description with data collection techniques including interviews, documentation, and observations. This program focuses on research and skills development. Program participants receive training in various fields such as baking, makeup artistry, air conditioning services, and sewing. With enhanced skills, participants are better equipped to seek better job opportunities. The program also bridges the gap between self-employment and companies in need of specific services or products. Through such collaboration, program participants have the opportunity to expand their market reach. The program can provide financial assistance in the form of low-interest loans or business capital grants to participants who have completed their training and have a business plan. This financial assistance helps them start their businesses without significant obstacles. Additionally, the program provides facilities support to kickstart self-employment ventures. The program also involves business mentoring and coaching. Participants are guided by mentors from the Department of Labor, Transmigration, and Energy, who assist them in facing challenges and provide advice for sustainable business development. This program can make a significant contribution to increasing job opportunities, reducing unemployment, and improving the well-being of the community in the region.*

---

**1. Pendahuluan**

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan berbagai dampak sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk tingkat pengangguran. Pandemi Covid-19 menciptakan ketidakpastian ekonomi yang signifikan. Banyak perusahaan menghadapi tantangan keuangan dan kesulitan dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Akibatnya terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau mengurangi jumlah karyawan dan menciptakan pengangguran. Pengangguran merupakan masalah

ketenagakerjaan yang dialami oleh banyak Negara yang sulit untuk diatasi, termasuk Indonesia. Bila kita amati dari tahun ke tahun, jumlah pengangguran di Indonesia masih berada di persentase yang tinggi. Pengangguran merupakan masalah nasional yang harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta maupun antar instansi pemerintah. Banyaknya jumlah pengangguran jika tidak segera diatasi maka akan berdampak pada berbagai masalah baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Tantangan terbesar dalam bidang ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini adalah tingkat pengangguran yang masih besar jumlahnya. Manusia merupakan salah satu faktor produksi, hal ini apabila timbul adanya pengangguran pada masyarakat berarti alokasi sumber daya dan produksi pada suatu wilayah bahkan nasional masih kurang optimal. Pengangguran merupakan kondisi saat seseorang tidak bekerja yang dalam usia produktif antara 15 – 65 tahun. Pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran dapat menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat, faktor utama kemiskinan, mendorong tindak kriminalitas serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pengangguran yang masih sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya penduduk dari segala penjuru Indonesia memilih untuk meninggalkan daerahnya untuk bekerja di DKI Jakarta. Hal tersebut mengakibatkan daya saing angkatan kerja di Jakarta menjadi semakin tinggi. Dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang masih belum terserap secara optimal oleh lapangan pekerjaan maka menyebabkan banyaknya pengangguran, hal ini dikarenakan angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga menjadikan tingkat pengangguran di DKI Jakarta menjadi tinggi. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat menjadikan tolak ukur terhadap tingginya pengangguran, karena tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan presentase antara total pengangguran terhadap angkatan kerja, yang dimana semakin tinggi presentase suatu daerah maka akan semakin tinggi juga tingkat pengangguran. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tingkat pengangguran di Jakarta Utara masih relatif tinggi dan masalah ketenagakerjaan masih menjadi tantangan bagi Disnaker setempat. Adapun tingkat pengangguran yang relatif tinggi di Jakarta Utara dipengaruhi oleh pertumbuhan kesempatan kerja yang tidak seimbang dan juga banyaknya pengangguran terdidik yang berasal dari perguruan tinggi yang masih belum terserap secara maksimal. Hal ini dikarenakan kualitas lulusannya tidak sesuai skill yang dibutuhkan pada dunia usaha maupun dunia industri. Melihat begitu urgentnya masalah pengangguran harus segera diatasi oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan adanya program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

Pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) mengacu pada dokumen Petunjuk Teknis Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 5/PPTKPKK/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Tahun 2019. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja, mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Selain itu pula, fokus utama dari program TKM adalah pendampingan kelompok yang dilakukan oleh tenaga pendamping sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Penelitian ini didasari pada penelitian sebelumnya mengenai tenaga kerja mandiri (Fitri 2020; Jamhri & Khotimah, 2022; Marsella, 2019; Nurfauziah & Nurcahyanto, 2022; Simbolon, 2020) Perbedaan dari penelitian terdapat pada lokasi, analisis data dan metode yang digunakan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menganalisis secara mendalam implementasi program tenaga kerja mandiri dalam mengurangi pengangguran di wilayah Jakarta Utara. Lokasi penelitian ini dilakukan di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data

sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu Penentuan informasi berjumlah 7 orang. Teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori dari Edward III mengenai implementasi kebijakan yang terdiri dari 4 indikator yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu; Kepala Seksi Pelatihan, Produktivitas, Transmigrasi dan Energi, Peindamping Program Tenaga Kerja Mandiri, dan Masyarakat Peserta Program Tenaga Kerja Mandiri.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **a. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Angka Pengangguran di Wilayah Jakarta Utara**

Jika dilihat dari tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta menunjukkan perubahan, dimana setiap tahunnya hampir mengalami penurunan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) DKI Jakarta tertinggi pada tahun 2020 yaitu 12,27 %, sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terendah pada tahun 2022 yaitu 7,10%. Wilayah Jakarta Utara menjadi nomor dua setelah wilayah Jakarta Barat dengan jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi. Tingkat pengangguran di Jakarta Utara di pengaruhi oleh meningkatkan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan, adanya pengaruh upah minimum, dan pengaruh dari kualitas sumber daya manusia.

Dalam meningkatkan sumberdaya manusia, negara Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai kendala, salah satunya yaitu kesempatan kerja. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan atau ketimpangan sosial dalam mendapatkannya. Kesenjangan / ketimpangan sosial inilah yang akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Pengangguran di Indonesia saat ini didominasi oleh pengangguran yang memiliki pendidikan cukup tinggi. Dilihat dari sudut pandang positif tenaga kerja merupakan salah satu sumberdaya yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara dalam (Suhandi, 2020).

**Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta Menurut  
 Kabupaten/ Kota (Persen) 2020 – 2022**

Kab Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten / Kota (Persen)		
	2020	2021	2022
Jakarta Barat	12,27	9,06	7,10
Jakarta Utara	11,79	9,84	8,39
Jakarta Pusat	10,97	7,75	5,88
Jakarta Selatan	10,79	7,33	5,63
Jakarta Timur	9,29	8,23	8,08
Kepulauan Seribu	7,37	8,58	8,47

*Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022*

Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran di Jakarta Utara. Tenaga kerja mandiri adalah konsep di mana individu atau kelompok menciptakan peluang kerja sendiri dengan memulai usaha atau kegiatan ekonomi yang mandiri. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut dengan memfokuskan peluang, pelatihan dan pembekalan bagi tenaga kerja terdidik. Hal ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam upaya mengatasi kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran dengan cara meningkatkan produktivitas masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah. Pada pelaksanaan program tenaga kerja mandiri (TKM) memiliki 9 (sembilan) tahapan antara lain : rekrutmen dan seleksi calon, mengenal potensi, penetapan hasil seleksi, pembentukan kelompok, pembekalan kelompok, pendampingan, bantuan sarana usaha, pengawasan dan evaluasi, pelaporan.

Sebagaimana Kepala Seksi Pelatihan Penempatan Produktivitas dan Transmigrasi Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Utara menyatakan. dikatakan bahwa Pengangguran di Jakarta Utara masih tergolong tinggi, tetapi Suku Dinas Tenaga Kerja selalu berupaya untuk mengurangi angka pengangguran, salah satunya dengan mengadakan pelatihan-



pelatihan pada program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengasah dan mengembangkan keterampilan mereka dalam membangun usaha sehingga usahanya dapat berkembang.

Informasi dari pendamping program tenaga kerja mandiri pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi menyatakan Setiap masyarakat berhak untuk mengikuti program tenaga kerja mandiri ini, tujuan adanya program ini yaitu untuk mengurangi pengangguran di wilayah Jakarta Utara, jadi kami selaku pelaksana ingin mengajak masyarakat wilayah Jakarta Utara untuk dapat membuka peluang usaha sesuai dengan minat dan kemampuan yang relevan pada masyarakat. Program tenaga kerja mandiri (TKM) ini melalui beberapa proses, mulai dari perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pelatihan langsung dengan instruktur dari praktisi industri sehingga menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi *skill* sesuai dengan kebutuhan industri. Program tenaga kerja mandiri (TKM) di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi memberikan bantuan berupa fasilitas bantuan yang menunjang dalam pelatihan bidang yang diikuti seperti pada bidang kue akan diberikan fasilitas oven, loyang, mixer dan lain sebagainya.

#### **b. Implementasi Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Wilayah Jakarta Utara**

Salah satu unsur yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi dalam penelitian ini digunakan agar pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi untuk mengkomunikasikan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) kepada masyarakat dan dalam penyampaiannya harus benar dan tepat agar masyarakat dapat memahami. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik juga. Kejelasan informasi merupakan hal yang penting karena dengan adanya kejelasan komunikasi diharapkan tidak terjadi adanya perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan penerima kebijakan (masyarakat).

**Data Peserta Tenaga Kerja Mandiri Periode Januari – Juni 2023**

No	Kecamatan	Jenis Pelatihan (Jumlah)				
		Pelatihan Kue	Pelatihan Tata Rias	Pelatihan Perbaikan AC	Pelatihan Menjahit	Pelatihan Aneka Minuman
1.	Kelapa Gading	85	47	35	55	32
2.	Cilincing	87	41	20	52	17
3.	Koja	76	42	15	58	27
4.	Tanjung Priok	93	53	25	57	33
5.	Pademangan	54	25	10	35	23
6.	Penjaringan	43	20	17	28	19
<b>Total</b>		<b>438</b>	<b>228</b>	<b>122</b>	<b>285</b>	<b>151</b>

Berikut data yang diperoleh dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara, peserta tenaga kerja mandiri peridoe Januari – Juni 2023 dari pelatihan kue sebanyak 438 peserta, dari pelatihan tata rias sebanyak 228 peserta, dari pelatihan perbaikan AC sebanyak 122 peserta, dari pelatihan menjahit sebanyak 285 peserta dan peserta pelatihan aneka minuman sebanyak 151 peserta.

Komunikasi yang baik merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa hasil pelaksanaan program berjalan dengan efektif. Komunikasi yang baik memungkinkan berbagai pihak terlibat dalam program, seperti peserta, pendamping, manajemen program dan lainnya untuk bekerja sama dengan baik dan mencapai tujuan program secara lebih efisien. Komunikasi yang baik memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, proses, dan harapan dari program. Komunikasi yang efektif dapat memberikan panduan yang jelas mengenai tugas, tanggung jawab, dan langkah-langkah yang harus diambil.



Sosialisasi yang dilakukan pendamping kepada masyarakat yaitu menginformasikan apa saja program-program yang akan diadakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan pendamping bahwa Sosialisasi yang dilakukan kami para pendamping yaitu dari mulut ke mulut, jadi nanti kami akan menginformasikan kepada masyarakat program-program apa saja yang akan diadakan dalam setahun ini dan nanti kami informasikan kepada masyarakat mengenai program-program tersebut. Sebagaimana pendamping program Tenaga Kerja Mandiri mengatakan bahwa yang terlibat dalam mensosialisasikan program Tenaga Kerja Mandiri, hampir semua pihak terlibat ya baik dari Sudin sendiri, pihak kecamatan dan kelurahan juga ikut terlibat dalam sosialisasi ini. Jadi proses sosialisasinya pertama kami sosialisasi ke pihak kecamatan dan kelurahan, setelah itu dari pihak kecamatan dan kelurahan turun ke para ketua RW dan ketua RT kemudian setelah itu diteruskan kepada masyarakat.

Dari hasil di atas peneliti menganalisis bahwa komunikasi pada sosialisasi program Tenaga Kerja Mandiri dapat dikategorikan sudah baik. Hal ini dilihat dari tahap-tahap proses sosialisasi yang diberikan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi hingga sampai kepada masyarakat sudah memberikan kejelasan sehingga masyarakat mudah memahami tentang proses tahapan dalam mengikuti program Tenaga Kerja Mandiri.

Sumber daya merupakan faktor penting dalam terselenggaranya keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia, anggaran maupun fasilitas. Sumber daya manusia di dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting. Sumber daya ini berkaitan dengan segala sumber yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Bagian dari sumber daya ini meliputi jumlah staff, keahlian dari pihak pelaksana, informasi yang relevan dalam pengimplementasian kebijakan, sumber-sumber terkait dengan pelaksanaan program, kewenangan yang menjamin program itu sendiri, serta fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan program.

Selain itu peran pendamping dalam suatu program memiliki signifikansi yang besar dan dapat memberikan dampak positif. Pendamping memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan,

bimbingan dan dukungan kepada peserta program. Pendamping dapat membantu peserta melihat dampak positif dari program, mengatasi kekhawatiran dan menjaga semangat dalam menghadapi tantangan. Dalam pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri mempunyai 12 pendamping untuk 6 kecamatan di Jakarta Utara. Jumlah pendamping sangat mempengaruhi kualitas dan efektivitas suatu program. Jumlah pendamping yang cukup dapat memastikan bahwa setiap peserta mendapatkan perhatian dan bimbingan yang memadai. Hal ini penting untuk membantu peserta dalam mengatasi hambatan dan mencapai tujuan program itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan pernyataan informan pendamping program tenaga kerja mandiri Untuk di Sudin sendiri kami mempunyai 12 orang pendamping yang mewakili 6 kecamatan di Jakarta Utara, jadi di 1 kecamatan itu ada 2 pendamping” Kemudian pendampin program tenaga kerja mandiri mengatakan bahwa Untuk jumlah pendamping 12 orang dan masing-masing kecamatan di dampingi 2 pendamping dan menurut saya sudah cukup ya, mereka bisa handle kecamatan masing-masing. Ruangan yang nyaman dengan fasilitas yang memadai, seperti pencahayaan yang baik, ventilasi yang cukup dan kursi yang nyaman, akan membantu peserta lebih nyaman dan berfokus pada pelatihan. Pemakaian ruangan di aula pada pelatihan ini lebih nyaman dibandingkan di lobby. Aula pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dilengkapi dengan peralatan yang cukup memadai seperti proyektor, layar dan sistem suara sehingga fasilitator dalam memberikan materi bisa lebih efektif dan menarik. Sedangkan Pemakaian ruangan di lobby pada pelatihan ini terlihat tidak rapi dan peralatannya pun sangat terbatas.

Hal ini diutarakan oleh Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas dan Transmigrasi yang mengatakan bahwa Ruangan kami memang masih terbatas yaa, kita hanya punya aula 1, jika sedang ada banyak pelatihan jadinya ada yang ngalah melakukan pelatihan di lobby, seperti sekarang nih ada dua pelatihan yang sedang berjalan bidang kue dan tata rias, dikarenakan jumlah peserta bidang kue lebih banyak jadi pelaksanaan pelatihan yang di aula bidang kue. Tapi kami berupaya untuk mencari solusi, kami sedang membangun ruangan serba guna disebelah kantin, yang mana nanti akan digunakan untuk pelatihan selanjutnya.

Fasilitas juga termasuk dalam sumber daya yang penting dalam satu program. Fasilitas merujuk pada berbagai perlengkapan dan lingkungan yang mendukung pelaksanaan program dengan baik. Fasilitas yang baik dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi dan efektivitas program secara keseluruhan. Pemenuhan fasilitas yang sesuai dan berkualitas merupakan bagian penting dari perencanaan yang sukses. Fasilitas yang baik akan membantu menciptakan pengalaman yang lebih positif bagi peserta dan mendukung pencapaian tujuan program secara lebih efektif. Dari hasil diatas peneliti menganalisis bahwa sumber daya pada program Tenaga Kerja Mandiri dapat dikategorikan sudah baik. Hal ini dilihat dari sumber daya pelaksana, sumber daya fasilitas sumber dan sumber daya finansial. Tetapi pada prasarana yang disediakan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi masih kurang. Dikarenakan ruangan yang disediakan masih cukup terbatas.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan salah satu hal yang penting. Dikarakan dalam menjalankan tugasnya pelaksana harus paham dan memiliki pandangan yang baik terkait dengan kebijakan tersebut. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin berjalan efektif, dapat terlihat dari sikap para pelaksana kebijakan. Jika para pelaksana kebijakan bersikap baik, maka akan menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Dan begitupun sebaliknya, apabila sikap pelaksana tidak baik maka pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit untuk terimplementasikan.

Karakter yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan pelaksana untuk tetap beraa dalam program yang telah ditentukan, sedangkan komitmen yang tinggi akan membuat pelaksana memiliki sikap yang antusias yang tinggi dalam menjalankan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Dalam hal ini Kepala Seksi Pelatihan Penempatan Produktivitas dan Transmigrasi mengatakan bahwa “Komitmen kami dalam menjalankan program tenaga kerja mandiri yaitu dengan selalu menjaga komunikasi dengan peserta, jadi kita akan buat grup di Whatsapp, jadi kami akan selalu memberikan informasi. Dan juga jika pelatihannya sudah berakhir tetapi peserta ada membutuhkan bantuan seperti pembuatan perizinan usaha, sertifikasi halal, pembuatan logo usaha sampai pemasarannya pun kami akan siap untuk membantu, jadi kami tidak langsung lepas tangan setelah peserta selesai ikut pelatihan kita akan dampingi peserta sampai peserta bisa di lepas sendiri. Kemudian pendamping program Tenaga Kerja Mandiri mengatakan untuk pengawasan kami terkadang berkunjung ke para binaan ya, disitu kami nilai usahanya seperti berjalan atau berkembang usahanya seperti apa karena kita lepas gitu saja kan tidak mungkin, jadi kita sering berkunjung untuk mengecek seperti satu sampai dua bulan sekali. Dan terkadang kami akan take video usahanya agar menjadi role model untuk binaan-binaan yang lainnya.

Dukungan para pelaksana program sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adanya peran dari pelaksana program untuk mengimplementasikan kebijakan program tenaga kerja mandiri yang efektif yaitu memberitahukan kepada masyarakat secara menyeluruh. Sikap merupakan pola yang ditunjukkan dalam interaksi dengan lingkungan sosial. Pentingnya membangun sikap yang baik untuk membangun sebuah kenyamanan. Apalagi untuk pelaksana kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat menyatakan bahwa sikap pelaksana dalam implementasi program tenaga kerja mandiri sudah baik dapat menunjukkan tingkat disposisi yang cukup tinggi dalam rangka implementasi program tenaga kerja mandiri sesuai dengan arah kebijakan atau ketentuan dan petunjuk yang telah ditetapkan.

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang penting terhadap implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan biasanya dibuat *Standart Operational Procedur* (SOP). SOP menjadi acuan bagi setiap para pelaksana kebijakan dengan tujuan tidak melenceng dari tujuan

dan sasaran yang jika hal itu terjadi dapat melemahkan pengasawan dan menyebabkan aktivitas organisasi tidak berjalan dengan baik dan tidak fleksibel. SOP yang baik dan benar mencantumkan kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit-belit dan mudah di pahami. Dengan adanya SOP, dapat menjalankan tugasnya sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menjadikan efektivitas dan efisiensi kinerja. Struktur birokrasi yang baik membantu memastikan bahwa SOP diikuti dengan kualitas yang konsisten.

Dalam hal ini Kepala Seksi Pelatihan Penempatan Produktivitas dan Transmigrasi mengatakan syarat untuk pendaftaran program tenaga kerja mandiri ini hanya membutuhkan KTP dengan domisili di Jakarta Utara, tetapi dalam pendaftarannya itu harus melalui link yang dibagikan oleh pendamping pada masing-masing wilayah, misalnya jika berdomisili di Cilincing ya mendaftarnya pada link yang dibagikan pendamping wilayah Cilincing dan juga link itu hanya berlaku satu kali dalam pendaftaran jadi jika NIK nya sudah terdaftar tidak bisa untuk mendaftar lagi.

Struktur birokrasi merujuk pada hierarki, tugas, dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Struktur birokrasi membantu mengatur bagaimana proses kebijakan program dijalankan, serta memastikan bahwa semua orang terlibat dalam proses tersebut memahami perannya dengan jelas. Dengan struktur yang terorganisir dengan baik, proses program dapat dijalankan dengan lebih efisien. Setiap kelompok atau individu mengetahui kapan harus beraksi, bagaimana harus melakukannya dan kepada siapa harus melaporkannya. Dengan struktur birokrasi yang jelas, mudah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab jika ada kesalahan atau masalah dalam pelaksanaan SOP. Hal ini dapat mendukung akuntabilitas dalam organisasi.

Hal ini sesuai dengan pernyataan pendamping program Tenaga Kerja Mandiri mengatakan pada dasarnya dalam melaksanakan tugas pendampingan program tenaga mandiri kami mengacu pada apa yang sudah disosialisasikan oleh pimpinan tentang program tenaga kerja mandiri. Ya, pastinya yang disampaikan oleh ibu kasi harus kami laksanakan. Pembagian tugas dari pemimpin juga sudah pada porsi masing-masing, seperti ada bagian penyuluhan dan informasi, pendampingan

dalam pemasaran, penilaian usaha, pemantauan, evaluasi serta pelaporan hasil. Semua sudah diberikan tugas dan kewenangan masing-masing.

#### **4. Pembahasan**

##### **a. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Menjadi Pilihan Dalam Usaha Mengurangi Angka Pengangguran di Wilayah Jakarta Utara**

Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara memberikan pembinaan dan pendampingan bagi peserta program tenaga kerja mandiri (TKM). Pendampingan ini dapat membantu peserta dalam mengatasi kendala atau tantangan yang dihadapi selama menjalankan usaha mereka. Jika pencari kerja tidak memiliki keterampilan atau kemampuan yang relevan dengan permintaan pasar, maka akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Pendampingan akan membantu peserta dalam merencanakan dan mengelola usahanya, memberikan arahan dalam mengatasi tantangan bisnis dan memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas produk yang akan ditawarkan. Pendampingan ini akan terus dilakukan sampai peserta bisa berjalan sendiri.

Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara berupaya menjembatani akses pembiayaan bagi tenaga kerja mandiri yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha peserta. Akan bantuan keuangan berupa pinjaman dengan suku bunga rendah atau hibah modal usaha bagi peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dan memiliki rencana bisnis. Bantuan keuangan ini membantu mereka memulai bisnis tanpa hambatan besar. Selain itu peserta akan dibantu oleh pendamping dalam pengurusan izin usaha, NIB, sertifikat halal, pembuatan logo usaha dan lain sebagainya.

Dari pemaparan diatas, peneliti menganalisis bahwa dengan adanya program tenaga kerja mandiri (TKM) sangat sesuai menjadi salah satu cara pemerintah dalam mengurangi pengangguran di wilayah Jakarta Utara. Program tenaga kerja mandiri ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memberdayakan tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan beragam.



**b. Implementasi Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Dalam Mengurangi Pengangguran di Wilayah Jakarta Utara**

Proses penyampaian informasi Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara tentang Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) kepada peserta Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), hal tersebut dilakukan agar program ini dapat terimplementasikan secara tepat dan jelas. Penyampaian informasi tersebut dilakukan pada saat sosialisasi dan pelatihan. Penyampaian informasi tersebut dilakukan oleh pendamping program yang berjumlah 12 orang yang ditugaskan mensosialisasikan ke 6 kecamatan di wilayah Jakarta Utara. Sosialisasi ini dihadiri oleh pihak kelurahan dan kecamatan yang kemudian nanti akan di teruskan ke masyarakat setempat.

Dari pemaparan data yang informan yang menyatakan bahwa komunikasi dilakukan dengan cara sosialisasi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi tentang Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh George C. Edward III, yang menyatakan bahwa kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta penyampaiannya dengan baik dan jelas. Dikarenakan sudah baiknya komunikasi yang diberikan Suku Dinas Tenaga Kerja Mandiri, Transmigrasi dan Energi terlihat dari antusias masyarakat yang mengikuti program tenaga kerja mandiri yaitu selama periode Januari – Juni 2023 terdapat 1.224 peserta pada pelatihan kue, tata rias, perbaikan AC, aneka minuman dan menjahit. Preskripsi dari hal tersebut yaitu masyarakat program Tenaga Kerja Mandiri di Jakarta Utara mudah memahami tentang proses tahapan dalam mengikuti program Tenaga Kerja Mandiri.

Pada pembahasan mengenai hasil dalam indikator sumber daya yang terdapat pada implementasi program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) tidak akan berhasil apabila tanpa dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas dan berkuantitas. Kualitas sumber daya ini meliputi keterampilan, profesional dan kompetensi di bidangnya. Sedangkan kuantitas sumber daya

meliputi jumlah sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu implementasi, karena tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkuantitas implementasi kebijakan akan berjalan dengan lambat. Oleh karena itu implementasi program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam mengurangi pengangguran membutuhkan sumber daya yang berkualitas dan berkuantitas serta mampu untuk menguasai kemampuan dibidangnya.

Selain itu salah satu yang penting adalah sumber daya non manusia yang meliputi fasilitas, sarana dan prasarana dan juga sumber daya finansial. Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang penting dalam menjamin mutu pelayanan dalam pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Oleh karena sarana dan prasarana harus secara tepat saat disediakan. Hal ini terlihat dari alat-alat pelatihan yang sudah disediakan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara alat-alat tersebut akan memudahkan peserta dalam praktik langsung. Tetapi pada ruangan yang disediakan masih kurang memadai karena masih ada pelaksanaan pelatihan yang di lobby. Pelaksanaan yang di lakukan di lobby ini terlihat tidak rapi dan peralatanya pun sangat terbatas.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana merupakan faktor yang penting pada terselenggaranya kebijakan. Pada Dalam hal ini sumber daya manusia pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara sudah dikatakan berkualitas dan berkuantitas. Dan juga sarana dan prasarana yang disediakan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena semua fasilitas yang dibutuhkan peserta pada saat pelatihan pada bidang yang diikuti sudah disediakan sehingga peserta tidak perlu lagi membawa. Namun dengan demikian karena prasarana yang disediakan masih kurang memadai sehingga program dan pelaksanaan tenaga kerja mandiri masih perlu di evaluasi. Evaluasi dan pemantauan indikator sumber daya ini akan membantu menilai efektivitas program dan memastikan bahwa

sumber daya yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan membantu mencapai tujuan program dengan lebih baik.

Berdasarkan data hasil penelitian dari informan menyatakan bahwa sikap pelaksana baik dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Kasi Pelatihan dan Produktivitas serta pendamping program dalam implementasi Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sudah terbilang baik. Hal ini dilihat dari komitmen yang diberikan oleh pelaksana kebijakan, dimana peserta akan terus didampingi dalam berwirausaha dan akan dibantu dalam pengurusan izin usaha hingga peserta bisa berdiri sendiri. Pelaksanaan program tenaga kerja mandiri juga cukup optimal sudah menjalankan tupoksi mereka masing-masing. Dapat dilihat dari pendamping sebagai pelaksana kebijakan selama ini terus aktif dalam memberikan informasi seperti pertemuan, pengarahan, pelatihan serta pengawasan. Kepala Seksi Pelatihan, Produktivitas dan Transmigrasi menjalankan tugas sebagaimana sesuai dengan tugas dan fungsinya yakni dalam pelaporan, monitoring, evaluasi dan memantau yang terjadi di lapangan dibuatlah komunikasi melalui platform chatting sehingga kebijakan tersebut dijalankan dengan responsif dan efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa sikap para pelaksana sudah bersikap baik. Dan sudah bertanggung jawab. Hal ini karena adanya dukungan dari banyak pihak khususnya peserta program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Hal ini juga diungkapkan oleh peserta jika sikap pelaksana sudah baik dapat bekerjasama dan selalu membantu. Penggunaan indikator disposisi ini akan membantu dalam menilai kesiapan dan potensi peserta program untuk berhasil dalam usaha mandiri mereka. Evaluasi disposisi ini juga dapat membantu program tenaga kerja mandiri dalam menentukan jenis dukungan dan pendekatan yang tepat untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan usaha mandiri.

Pelaksana Program Tenaga Kerja (TKM) pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara telah diatur dengan prosedur-prosedur atau sudah sesuai SOP. Hal ini terlihat dari syarat pendaftaran yang harus memiliki KTP berdomisili Jakarta Utara dan juga hanya bisa mendaftar satu kali dengan menggunakan NIK yang sama. Kemudian pembagian dan wewenang

pada tugas masing-masing misalnya pendamping. Dari 12 pendamping yang ada di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara memiliki tugas masing masing. Ada yang bertugas untuk penyuluhan dan informasi, pendampingan dalam pemasaran, penilaian usaha, pemantauan, evaluasi serta pelaporan hasil. Dengan adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas, pendamping dapat bekerja secara terfokus dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan program yang lebih efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa SOP dalam Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi sudah baik jika dilihat dari aspek SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab dari pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Struktur birokrasi sudah ada dari level yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang terendah yaitu daerah. Dalam pembagian tugasnya pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi sudah memiliki tugas dan wewenang masing- masing. Hal ini dikarenakan dengan pembagian tugas dari setiap bagian akan memberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas sehingga menjadi seragam dan konsisten.

## 5. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Dalam Mengurangi Pengangguran Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara sebagai berikut : (1) Program tenaga kerja mandiri (TKM) menjadi solusi yang efektif dalam mengurangi angka pengangguran di wilayah Jakarta Utara. Program tenaga kerja mandiri ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memberdayakan tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan beragam. Dengan mengurangi jumlah angka pengangguran, program tenaga kerja mandiri dapat membantu mengurangi beban sosial. Program ini sudah mencapai hasil yang efektif karena dalam pelaksanaanya sudah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait termasuk lembaga

pelatihan, perusahaan dan organisasi kewirausahaan. (2) Implementasi program tenaga kerja mandiri (TKM) untuk mengurangi pengangguran haruslah dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Berikut empat indikator yang digunakan dalam sebagai berikut: (a) Komunikasi

Pada indikator komunikasi pelaksanaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam pemberian informasi yaitu berupa sosialisasi. Dalam pelaksanaannya Utara sudah berjalan baik, karena informasi yang disampaikan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Mandiri, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara sudah tepat sasaran. Hal ini dilihat dari masyarakat program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Jakarta Utara yang mudah memahami tentang proses dan tahapan dalam mengikuti program Tenaga Kerja Mandiri. (b) Sumber Daya Pada indikator sumber daya ini, implementasi program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) bahwa sumber daya manusia (pegawai Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara) sudah dikatakan berkualitas dan berkuantitas hal ini dilihat dari kinerja dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai divisi masing-masing. Dan juga sarana dan prasarana yang disediakan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena semua sarana yang dibutuhkan peserta pada saat pelatihan pada bidang yang diikuti sudah disediakan, sehingga peserta tidak perlu lagi membawa. Tetapi pada prasarana yang disediakan masih kurang memadai, ini terlihat dari pelaksanaan pelatihan masih ada yang di Lobby. (c) Disposisi Pada indikator disposisi pelaksanaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara sudah baik. Hal ini dilihat dari komitmen yang diberikan oleh pelaksana kebijakan, dimana peserta akan terus didampingi dalam berwirausaha dan akan dibantu dalam pengurusan izin usaha, pembuatan logo, pembuatan sertifikasi halal hingga peserta bisa berdiri sendiri dalam usahanya. (e) Struktur Birokrasi Pada indikator struktur birokrasi, Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sudah dijalankan dan di atur sesuai *Standart Operational Procedur (SOP)*. Hal ini dilihat dari aspek SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab dari pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). pembagian tugas

dari setiap bagian akan memberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas sehingga menjadi seragam dan konsisten sehingga mengurangi tumpang tindih tugas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasa-Dasar Kebijakan Publik (Edivisi Revisi)*. PT. Remaja osdakarya
- Alwi, Z. (2022). *Analisis peran dinas tenaga kerja dalam upaya mengurangi masalah pengangguran terdidik di wilayah kota pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia. Jakarta
- Fitri, I. T. R. N. (2022). *Penanggulangan pengangguran melalui program kartu prakerja pada dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk aceh*. Universitas islam negeri ar-raniry banda aceh.
- Jamhari, T., & Khotimah, N. (2022). Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM): Konsep dan Implementasi. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(3), 268–284.  
<https://doi.org/10.47198/naker.v17i3.133>
- Marsella, anis. (2019). *Efektivitas pelaksanaan program tenaga kerja mandiri dalam mengatasi pengangguran di dinas tenaga kerja simalungun*. Universitas muhammadiyah sumatera utara.
- Nurfauziah, N. M., & Nurcahyanto, H. (2022). *Analisis Efektivitas Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Kabupaten Purwakarta*.





JOURNAL OF POLITICS AND  
DEMOCRACY STUDIES

## PARAPOLITIKA

*Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)*

Volume 4 Nomor 1, September- Februari 2023

ISSN 2721-771X (Online)

---

Simbolon, D. R. (2020). *Peranan dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi daerah istimewa yogyakarta dalam penanggulangan pengangguran di provinsi daerah istimewa yogyakarta*. Universitas atma jaya yogyakarta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Alfabet.

Suhandi, H. W. S. O. (2020). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika. Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia, 13(01)*.

